MINI RISET

PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DI TENGAH PANDEMI DAN PELAYANAN ONLINE TERHADAP KESADARAN WAJIB BAYAR PAJAK UMKM DI TULUNGAGUNG

Dosen Pengampu : R. Gesah Mukti P.,SE.,Ak,MM

Oleh :

YUNI PUPAH MUDRIKAH (1960302100063)

ADELIA IKSANI ALHAKIKI (1960302100064)

VAMUDAH RUPBIANTI (1960302100074)

ANGGITA FEBRIANI (1960302100077)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran wajib bayar pajak, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM, dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung baik secara parsial maupun simultan. Kebijakan pemerintah dengan menurunkan tarif pajak PPh untuk pengusaha UMKM yang diharapkan nantinya bisa membuat para pelaku usaha UMKM menjadi taat akan pembayaran pajak. Dengan adanya Covid-19 KPP memanfaatkan teknologi dengan cara melakukan pelayanan pajak secara online baik dalam pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang ada di web KPP TULUNGAGUNG.

Hasil dari

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak umkm, penurunan tarif pajak umkm

Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam sebuah Negara di mana pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap Negara yang juga cukup besar. Tanpa adanya pajak suatu Negara akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. "Menurut Soemitro dalam (Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Sementara itu, dari segi hukum, masyarakat sebagai warga negara terikat hukum untuk wajib menyetorkan pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut menjadi berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus di berikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang yang berlaku, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika seseorang memiliki pendapatan lebih dari Rp 4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila seseorang adalah pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak ini berdasarkan PP 23 Tahun 2018.

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro,kecil, dan menengah. Definisi dari UMKM merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. “Menurut Prof. Ina Primiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran mendeskripsikan UMKM sebagai aktivitas usaha skala kecil yang mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian Indonesia”(Jurnal Mitra Teknik Sipil 2020).

Ditjen Pajak sendiri selama ini telah memberikan kemudahan dan insentif pajak kepada pengusaha yang termasuk dalam kriteria UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat menghitung pajak terhutang langsung sebesar satu persen dari omzet. Bahkan dalam waktu dekat ini pemerintah berencana menurunkan Tarif Pajak untuk UMKM hingga 0,5 persen. Pengenaan Tarif Final tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, karena mereka tak perlu menyusun pembukuan.

Namun PP tersebut mengatur secara tegas penghitungan Tarif Final sebesar satu persen tersebut tidak berlaku bagi pengusaha yang bergerak di bidang jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Maka para profesional seperti: advokat, pengacara, konsultan hukum, dokter, arsitek, dan profesi sejenis tidak diperkenankan menggunakan fasilitas ini.

Tak cuma itu, pengusaha UMKM juga diberikan fasilitas untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 23 agar wajib pajak yang telah menghitung pajaknya secara final tersebut tak perlu direpotkan secara administrasi untuk mengurus kelebihan bayar pajak yang dipotong lawan transaksinya.

Ketika kita bicara pengenaan pajak untuk UMKM, kita harus mendudukan permasalahan ini pada perspektif yang lebih luas. Intinya pemerintah tak sekadar mencari dana saja, namun sebagai upaya pemerintah untuk membenahi semrawutnya permasalahan tenaga kerja Indonesia. Peningkatan kesejahteraan pekerja bisa dilakukan salah satunya dengan menarik minat sektor informal untuk beralih ke sektor formal, sehingga mereka akhirnya berada dalam sistem yang mudah diawasi negara.

E-billing, merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengurus pembayaran pajak yang telah di sediakan oleh dirjen pajak guna memudahkan para pelaku wajib pajak

dalam melakukan pembayaran pajaknya. Sistem ini di berlakukan mulai tanggal 1 Januari 2016. Ebilling termasuk dalam sistem pembayaran online perpajakan di Indonesia yang sudah di berlakukan. E-billing merupakan serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode, pembayaran, dan rekonsiliasi billing dalam system penerimaan Negara. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran melalui billing harus melakukan pengisian data setoran pajak secara elektronik melalui website direktoral jendral pajak <http://www.pajak.go.id>. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank/pos dengan cara menggunakan kode billing dan dalam jangka waktu 48 jam sejak di terbitkan. Apabila melewati batas waktu maka tidak bisa di gunakan dalam pembayaran, akan tetapi wajib pajak bisa membuat kembali kode billing.

Dengan penjelasan di atas, tidak ada alasan lagi buat pelaku UMKM mengeluh beban pajak tinggi, ataupun mengemplang pajak. Sebab peranan pajak dan UMKM sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Dan adanya pelayanan online yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak serta patuh membayarkan beban pajaknya.

LANDASAN TEORI

Pengertian pajak menurut “Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam (Muliadi 2015) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Konsep Dasar Perpajakan Indonesia Beberapa pengertian dan konsep dasar perpajakan di Indonesia, akan diuraikan di bawah ini.

1. Ketentuan Umum Perpajakan

a. Definisi-definisi dalam Ketentuan Umum Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 pengertian-pengertian dari beberapa hal yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang Digunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena untuk menyajikan gambaran mengenai variabel-variabel yang diteliti serta untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. “Menurut Sugiyono dalam (Mutiara 2018) metode penelitian kuantitatif

adalah sebagai berikut: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono dalam (Mutiarra 2018) adalah: “Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, likuiditas, leverage dan tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Menurut Sugiyono dalam (Mutiarra 2018) penelitian verifikatif sebagai berikut: “Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”. Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah Singkat KPP Pratama

”Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kemudian di tahun yang sama, dibentuklah dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga sebagai LTO (Large Tax Office). Satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2003, dibentuklah sebanyak sepuluh KPP khusus.”

DJP kemudian membentuk KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office) di tahun 2004 . Selanjutnya, dua tahun kemudian KPP Modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO (Small Tax Office) mulai dibuka untuk melayani Wajib Pajak. KPP Pratama mulai terbentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama ini merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani Wajib Pajak yang terbanyak.

Tugas KPP Pratama

Tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang:

- Pajak Penghasilan

- Pajak Pertambahan Nilai
- Dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- Berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak.
- Berfungsi sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya.
- Penyuluhan dan pelayanan perpajakan.
- Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi.
- Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, berikut ini struktur KPP Pratama:

- Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Bagian ini bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, dan sebagainya.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan masih banyak lainnya.
- Seksi Pelayanan, yang bertugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, dan sejenisnya.
- Selanjutnya ada Seksi Penagihan, yang bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, dan urusan piutang lainnya.
- Seksi Pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Tugas lainnya adalah pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan masih banyak lagi.
- Selain itu ada Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugasnya adalah melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak. Tugas lainnya adalah melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB.
- Dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, yang masing-masing memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam - melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.
- Dapat dikatakan bahwa KPP Pratama merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia. Hingga saat ini, KPP sudah dibentuk di seluruh wilayah Indonesia

Sejarah KPP Pratama Tulungagung

Tugas DJP sesuai dengan peraturan presiden No. 28 tahun 2015 tentang kementerian keuangan, dan peraturan Menteri keuangan No. 234/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan. Tugas dari jenderal pajak adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari direktorat jenderal pajak sendiri adalah

- Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.
- Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pajak.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Organisasi DJP terbagi menjadi dua yaitu unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Unit kantor pusat terdiri dari sekretariat direktorat jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit kantor operasional terdiri dari kantor wilayah DJP (Kanwil DJP), kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan (PPDDP) dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan (KPDDP). Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di 46 seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan kementerian keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut di berdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat. Tugas unit kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas kebijakan dari kantor pusat. Unit dapat dibedakan atas :

Kanwil DJP wajib pajak besar dan Kanwil DJP Jakarta khusus yang berlokasi di Jakarta.

Kanwil DJP selain kanwil DJP wajib pajak besar dan kanwil DJP Jakarta khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kanwil DJP sebanyak 33 unit. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu :

- KPP wajib pajak besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional.
- KPP madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa.
- KPP pratama, menangani wajib pajak lokasi.

KPP Pratama Tulungagung bekerja sama dengan Himpaudi Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kelas pajak pengisian SPT Tahunan secara daring melalui kanal pada situs web www.pajak.go.id dengan peserta seluruh lembaga PAUD se-Kabupaten Tulungagung. Kelas pajak ini diadakan di Ruang Serbaguna Lantai 3 KPP Pratama Tulungagung (Selasa, 24/2).

Kegiatan berlangsung selama dua minggu sejak 13 Februari 2020. Dalam satu hari terdapat dua sesi, sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan sesi kedua dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan prima serta agar wajib pajak, khususnya pengurus lembaga PAUD

dapat melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing atau e-Form secara mandiri di tahun-tahun berikutnya.

Dengan adanya kegiatan ini, KPP Pratama Tulungagung berharap masyarakat semakin sadar akan kemudahan yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yakni melaporkan SPT Tahunan melalui kanal pada situs web www.pajak.go.id.

Penurunan Tarif Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu Tahun Pajak. Pokok-pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omzet wajib pajak setiap bulan.

Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh Final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan jangka waktu selama 7 tahun. Sementara bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun. Lain lagi untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu 3 tahun saja.

Keadilan

“Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, salah satu ajaran yang terkenal mengenai perpajakan adalah *The Four Maxims*. Menurut Smith ada empat asas pemungutan pajak yaitu, asas Equality (keadilan), asas Certainly (kepastian hukum), asas Convenience of Payment (Pemungutan Pajak Tepat Waktu), dan asas Efficiency (Efisiensi). Asas Equality (keadilan) memberi penekanan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.”(Perubahan et al. 2019)

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasari oleh desakan para pelaku usaha terutama UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan. Hal ini terungkap dalam fans page resmi Presiden Joko Widodo yang menceritakan bahwa dalam beberapa pertemuan, pelaku UMKM mengeluhkan tingginya tarif PPh Final yang 1%. Mereka menghendaki agar tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% atau 0,25%.

Hal inilah yang memicu Presiden sehingga memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM. Sehingga kemudian lahirlah PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith.

Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan

kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak. Selain itu PP ini juga memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetapi sudah mampu melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori ini dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebuah pilihan yang sebelumnya tidak ada di PP Nomor 46 Tahun 2013.

Kejujuran Wajib Pajak

Berdasarkan Bagian Penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment. Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini mengandung arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri. Selanjutnya perhitungan dan pembayaran pajak tersebut dilaporkan secara teratur melalui media atau surat yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, keinginan untuk membayar pajak terutang, kerelaan wajib pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, dan kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UU KUP yang mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan adanya penurunan tarif ini tentu saja pemerintah berharap wajib pajak yang selama ini merasa keberatan dengan tarif 1% bisa lebih jujur mengungkapkan omset yang sebenarnya dari usaha yang dimiliki. Penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% merupakan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak pasca Tax Amnesty untuk menghitung, membayar dan melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian juga dengan pelaku UMKM yang selama ini belum mendaftarkan diri dan berkontribusi bagi negeri. Wajib pajak yang semula masih keberatan dengan tarif 1%, bisa tergerak dan berinisiatif mendaftarkan diri, mempunyai NPWP dan mulai membayar pajak dengan tarif baru 0,5%. Sedangkan Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dan merasa keberatan dengan tarif 0,5% masih mempunyai pilihan untuk melakukan pembukuan dan dikenakan pajak menggunakan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Tentu saja semua ini harus dilandasi dengan kejujuran dan itikad baik untuk membayar pajak dengan benar.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, "Nilai kejujuran tak dapat ditawar-tawar, karena merupakan sesuatu yang fundamental dalam membangun karakter bangsa. Sebuah negara akan besar dan dihormati bangsa lain jika memiliki integritas yang tinggi, pemimpin yang jujur, dan memiliki rakyat yang juga penuh dengan kejujuran dan berintegritas.

Kategorisasi Usaha Berdasarkan Omzet

UMKM sendiri merupakan satu kategori usaha yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 M dalam setahun. Dalam kategori ini, usaha masih digolongkan sebagai UMKM karena dianggap masih dalam masa pertumbuhan sehingga perlu dibantu untuk bisa mengoptimalkan usaha yang dilakukannya.

Selanjutnya untuk usaha kelas menengah, adalah usaha dengan omzet setahun berada di angka Rp4,8 M sampai dengan Rp50 M. Fase kedua dalam dunia usaha ini dianggap telah memiliki sistem yang mulai matang dan siap untuk berkompetisi secara nasional. Beban pajaknya juga tentu berbeda. Pada fase ini, pengusaha bisa mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak jika melakukan transaksi barang dan jasa kena pajak yang memiliki kewajiban PPN.

Fase terakhir adalah usaha besar, dengan omzet tahunan berada di atas Rp50 M dalam satu tahun. Usaha atau bisnis dalam skala ini telah memiliki sistem yang solid, pembukuan dan pencatatan yang baik serta tentunya memiliki kewajiban pajak yang cukup tinggi. Karena aturan yang digunakan dalam perpajakan kemudian adalah pajak penghasilan pada umumnya, yang tidak lagi bersifat final.

UMKM Industri Dinamis

Jika dilihat dari fasenya, UMKM sendiri merupakan fase yang sangat dinamis. Sangat banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungannya dengan membuka usaha baru. Usaha ini dimulai dari skala yang cenderung kecil. Selain lebih aman, usaha dalam skala kecil juga bisa digunakan untuk melakukan ‘cek ombak’, atau memeriksa respon masyarakat pada usaha yang dilakukan.

Belakangan ini, kinerja UMKM semakin meningkat karena animo masyarakat generasi muda untuk menjadi pengusaha semakin naik. Hal ini selain dipicu oleh kesempatan luas yang ditawarkan dunia usaha, juga karena pajak yang diberlakukan untuk skala UMKM sangat rendah. Misalnya usaha tidak menunjukkan hasil baik pada beberapa waktu, beban pajak yang ditanggung tidak akan terlalu memberatkan.

Namun demikian, dinamika skala UMKM juga sangatlah besar. Besarnya jumlah usaha rintisan yang dilakukan oleh anak muda tentu akan berbanding lurus pada tingkat kegagalan yang terjadi pada skala ini. Sekali lagi, ini merupakan fase awal dari usaha yang didirikan, sehingga memang resiko yang ada cenderung besar dalam hal keberhasilan usaha yang dilakukan.

Jangka Waktu Hak PPh Final UMKM

Pemberlakuan pajak penghasilan final pada sektor UMKM memiliki batas waktu tertentu. Dalam peraturan yang berlaku, begini skema ‘hak’ atas pajak bersifat final yang diberlakukan untuk UMKM.

- Wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun.
- Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun.
- Wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.

Proyeksi ini tentu telah melewati kajian sedemikian rupa yang disusun oleh pihak terkait. Batas waktu yang ditetapkan idealnya merupakan batas waktu yang diperlukan untuk wajib pajak

tersebut mengembangkan bisnis atau usahanya pada fase selanjutnya. Setelah dapat berkembang, baru kemudian usaha tersebut akan dikenakan skema perhitungan pajak normal.

Lalu bagaimana jika setelah melewati batas waktu usaha belum berkembang? Hal ini bisa dikoordinasikan langsung dengan DJP pada wilayah dimana usaha tersebut berada. Wajarnya, ketika usaha gagal berkembang terdapat kesalahan yang terjadi dan harus dibenahi. Solusinya mungkin adalah pengajuan perpanjangan masa, atau pembubaran usaha yang dilakukan.

Persiapan Pengenaan Pajak Tarif Umum

Dalam masa pemberlakuan pajak final di atas (7 tahun untuk orang pribadi, 4 dan 3 tahun untuk wajib pajak badan) menjadi kesempatan pelaku usaha untuk mengeksplorasi bidang yang dijalankan. Waktu ini juga digunakan untuk mempersiapkan diri melangkah pada fase selanjutnya, masuk ke kategori usaha menengah. Tentu dengan syarat usaha yang dirintis berhasil berkembang.

Pajak penghasilan final bersifat 0,5% sendiri merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk mendukung perkembangan industri UMKM di Indonesia. Dengan penerapan pajak yang kecil, UMKM bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya, tanpa dibebani oleh kewajiban pajak yang terlalu besar dan mungkin memberatkan.

Lalu kenapa tidak diberlakukan pajak 0% saja? Hal ini karena jumlah industri UMKM di Indonesia sangat besar, dan akan menjadi kerugian negara jika tidak ada pajak masuk dari sektor ini. Penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, dan UMKM memiliki porsi yang cukup signifikan pada penerimaan negara ini. Memang jika dilihat secara sempit, hanya sebesar 0,5%. Namun jika dikalikan dengan jumlah UMKM yang besar, maka penerimaan negara dari sektor ini tidak dapat disepelekan.

Kemudahan Administrasi Pajak

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak berhenti sampai pada rendahnya pajak yang diberikan, namun juga administrasi perpajakan yang ada. Sistem online yang kini sudah dapat digunakan, dapat menghemat sangat banyak waktu serta mempersingkat proses perpajakan yang ada. Administrasi perpajakan yang dilakukan menjadi jauh lebih efektif melalui berbagai layanan yang disediakan oleh DJP.

Dalam sektor pembayaran ada yang disebut e-Billing. Dalam sektor pelaporan, ada yang disebut e-Filing. Kemudian untuk faktur pajak, dapat menggunakan e-NoFa dan e-Faktur. Sistem berbasis online ini tentu memiliki banyak kelebihan dibandingkan sistem manual.

Klikpajak juga hadir untuk membantu wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan. Penghitungan, penyetoran hingga pelaporan berbagai macam pajak seperti misalnya pajak penghasilan bisa dilakukan pada platform tunggal dengan cepat, ringkas dan aman. Mengingat Klikpajak juga merupakan mitra resmi DJP, maka setiap prosesnya sudah sah dan valid. Segera daftar dan gunakan Klikpajak untuk membantu penyelesaian kewajiban perpajakan Anda.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Di jelaskan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun realita nya kegunaan pajak di Indonesia adalah untuk membayar cicilan hutang. hampir setiap tahun beberapa negara menerapkan sistem wajib membayar pajak, apalagi di negara berkembang contohnya Indonesia. Jadi, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang meski ada kasus penyelewengan yang terjadi, tentunya tidak semua petugas perpajakan melakukan perbuatan haram tersebut. Dapat dipahami bahwa pajak memiliki potensi yang kuat untuk bisa membayar hutang negara. Jika Anda orang bijak tentu Anda siap membayar pajak, sesuai kelas pendapatan Anda.

SARAN

Kita semua masyarakat di negara Indonesia wajib membayar pajak untuk kelangsungan hidup negara ini dan juga untuk membangun negara ini agar mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kewajiban membayar pajak yang sudah terlaksana ini wajib di wujudkan dengan wujud nyata mana hasil pembayaran pajak.

Pengawasan pajak di Indonesia sendiri kurang pengawasan alias kurang ketat sehingga masih memberikan jalan tikus untuk pelaku atau oknum curang petugas perpajakan, walaupun tidak semua, kejahatan sendiri sebenarnya tidak direncanakan hanya saja jika ada kesempatan memunculkan niatan jahat.

DAFTAR PUSAKA

- Jurnal Mitra Teknik Sipil, JMTS. 2020. "Daftar Isi." *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil* 3 (3). <https://doi.org/10.24912/jmts.v3i3.9051>.
- Muliadi, Dedi. 2015. "BUKU PEDOMAN AKADEMIK EKONOMI PEMBANGUNAN," 7–37.
- Mutiara, Neng Dewi. 2018. "Pengaruh Bisnis Jaket Jeans Berdasarkan Prinsip Kewirausahaan." *"Metode Penelitian Pada Dasarnya Merupakan Cara Ilmiah Untuk Mendapatkan Data Dengan Tujuan Dan Kegunaan Tertentu."* Dalam.
- Nurhastuti. 2019. "Sejarah Kpp Pratama."
- Perubahan, Pengaruh, Tarif Pajak, Umkm Dan, Literasi Media, Terhadap Kepatuhan, and Pajak Sukarela. 2019. "Dyah Tiara Putri Anggraeni, 2019 PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM DAN LITERASI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA."
- Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, MM. 2014. "Analisis Pemenuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Sektor Pajak" 1 (1): 103–20.